

# **Pemerintahan Darurat: Inisiatif Sipil dan Militer dalam Menjaga Republik<sup>1</sup>**

## **Bermula dari Agresi Militer Belanda II**

Telegram dari Perdana Menteri Belanda, Dr. L.J.M. Beel kepada Menteri Daerah Seberang Lautan, Mr. J.A. Jonkman tertanggal 10 Desember 1948 mendesak agar segera dilancarkan aksi militer terhadap Indonesia. Bell sendiri memiliki dua tujuan yaitu: (1) Republik sebagai suatu satuan ketatanegaraan harus dihancurkan melalui aksi total, pertama-tama ditunjukkan untuk menduduki ibukota Yogyakarta di Jawa dan Bukittinggi di Sumatera, serta objek-objek ekonomis seperti daerah penghasil minyak di Jambi dan sekitarnya; (2) Membentuk Pemerintahan Interim Federal berdasarkan Peraturan Pemerintahan dalam Peralihan, dimana wakil-wakil daerah Federal dan unsur-unsur di Republik yang kooperatif dengan Belanda harus turut ambil bagian, tokoh-tokoh seperti Sultan Hamengkubuwono IX, Sjahrir, dan Supomo diharapkan dapat ambil bagian di Pemerintahan Interif Federal mewakili bekas Republik (Ide Anak Agung Gde Agung, 1991: 195-196).

Pada tanggal 18 Desember 1948, pukul 11.30 WIB dengan perantaraan sepucuk surat, pemerintah Belanda memberitahu Komisi Tiga Negara (KTN), bahwa persetujuan gencatan senjata telah dibatalkan oleh Belanda. Pagi harinya tanggal 19 Desember 1948, pukul 05.00 WIB Belanda memulai aksi polisionilnya dengan membombardir dan menerjunkan prajurit payung melalui udara untuk menduduki pangkalan udara Maguwo, Yogyakarta. Tentara dan rakyat Indonesia sedang dalam kondisi tidak siap ketika itu, sehingga pada pukul 16.00 WIB Kota Yogyakarta sudah berhasil diduduki sepenuhnya oleh Belanda.

Sebenarnya jika menelusuri konstelasi dunia ketika itu, dunia internasional pada umumnya menentang penggunaan kekerasan oleh Belanda dalam mengatasi persoalan, sehingga ide untuk melancarkan agresi militer II adalah sebuah kebijakan yang tidak populis. Selain itu ada rasa frustrasi yang muncul dikalangan Belanda ketika delegasi yang terdiri dari para menteri dan wakil pemerintahan tertinggi kembali ke Belanda tanpa mencapai hasil apapun.

---

<sup>1</sup> Ditulis oleh Sumardiansyah Perdana Kusuma, Presiden/Ketua Umum Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI). Tulisan ini dibuat ditengah euphoria hari Bela Negara tanggal 19 Desember untuk memperingati deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan bertepatan dengan tanggal 22 Desember ketika agresi militer Belanda II dilancarkan 71 tahun yang lalu. Bagi penulis dua peristiwa tersebut saling berkaitan dan menjadi sebuah pelajaran kaitannya dengan peran sipil, militer, dan warga dunia dalam merespn konflik berkepanjangan antara Indonesia-Belanda.  
Penulis dapat dihubungi melalui email [sumardiansyahperdana@gmail.com](mailto:sumardiansyahperdana@gmail.com) atau [agsi.sejarah@gmail.com](mailto:agsi.sejarah@gmail.com)

## **Sengaja Ditangkap untuk Menggiring Opini?**

Para pemimpin Republik seperti Sukarno, Hatta, Agus Salim, Sjahrir dan seluruh anggota kabinet berhasil ditangkap oleh Belanda. Tanggal 22 Desember 1948 atas perintah Kolonel D.R.A van Langen para pemimpin Republik dibawa menggunakan pesawat pembom B-25 milik angkatan udara Belanda menuju Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkalpinang. Pada perjalanan itu yang diturunkan di Pangkalpinang lalu dibawa ke Bukit Menumbing Muntok hanya Mohammad Hatta (Wakil Presiden), Soerjadarma (Kepala Staff Angkatan Udara), Asaat (Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat), dan A.G. Pringgodigdo (Sekretaris Negara). Sementara rombongan Sukarno (Presiden), Agus Salim (Menteri Luar Negeri), dan Sjahrir terus diterbangkan menuju pengasingan<sup>2</sup> di Brastagi dan Parapat<sup>3</sup>, Sumatera Utara<sup>4</sup>.

Menurut M.C. Ricklefs para pemimpin Republik sengaja membiarkan dirinya ditangkap dengan harapan bahwa opini dunia akan tersinggung sehingga kemenangan militer Belanda akan berbalik menjadi kekalahan diplomatic (M.C. Ricklefs, 2010: 483-484). Hal ini tampaknya menjadi kenyataan setelah PBB merasa Belanda tidak menghargai segala upaya baik PBB untuk menengahi konflik Indonesia-Belanda. Agresi militer II juga sangat menyinggung martabat PBB karena pada saat serangan berlangsung anggota KTN sedang berada di Kaliurang, beberapa kilometer dari Kota Yogyakarta. Selanjutnya Dewan Keamanan PBB pada akhir Januari 1949 menuntut pembebasan anggota kabinet Republik, pembentukan pemerintahan sementara, dan penyerahan kedaulatan secara penuh sebelum tanggal 1 Juli 1950.

Agresi militer II yang dilancarkan di Jawa dan Sumatera juga memicu reaksi dari Amerika untuk menghentikan dana bantuan kepada Belanda yang dimaksudkan untuk keperluan di Indonesia, begitupun desakan dari Kongres agar Amerika benar-benar menghentikan sama sekali bantuan ekonomi terhadap Belanda. Reaksi internasional akhirnya mampu menekan Belanda untuk mengadakan gencatan senjata tanggal 31 Desember 1948 di Jawa dan tanggal 5 Januari 1949 di Sumatera.

Dibelahan lain, Perdana Menteri India, Pandit Jawaharhal Nehru segera mengadakan konferensi di New Delhi tanggal 20-23 Januari 1949 untuk membahas sengketa Indonesia-Belanda dengan dihadiri 21 negara seperti India, Indonesia, Persia, Srilangka, Afganistan,

---

<sup>2</sup> Menarik untuk kemudian menelusuri kiprah para Pemimpin Republik di tanah pengasingan, bagaimana bentuk adaptasi dan interaksi mereka di tanah pengasingan? apa saja yang mereka kerjakan disana? adakah hasil tindakan atau pemikiran yang mengarah kepada kepentingan bangsa dan negara?

<sup>3</sup> Satu kisah menarik dikutip dari Slamet Muljana bahwa benih-benih perpecahan antara Sukarno dan Sjahrir tumbuh di Parapat. Diawali dengan tindakan Sjahrir mengecam Sukarno dengan ungkapan “bodoh”, karena mengumumkan rencana kepergiannya ke India, sehingga membuat Belanda mempercepat serangannya ke Yogyakarta. Situasi semakin memanas ketika Sukarno dan Sjahrir berbeda pandangan atas keinginan Sjahrir yang saat itu berstatus tahanan politik untuk menemui Perdana Menteri Belanda, Willem Drees di Jakarta. Sjahrir kemudian mendesak dan meyakinkan Sukarno agar tetap berangkat, dengan alasan bahwa keberangkatannya untuk mengetahui jalan pikiran orang-orang Belanda dan berjanji akan segera kembali untuk melaporkan kepada Sukarno. Ironisnya Sjahrir akhirnya tidak pernah kembali dan memberi laporan kepada Sukarno (Slamet Muljana, 1986: 159-160).

<sup>4</sup> Pada akhir Januari 1949, Sukarno dan Agus Salim dengan alasan keamanan, akhirnya dipindahkan dari Parapat ke Bukit Menumbing Muntok untuk berkumpul dengan pemimpin Republik lainnya.

Birma, Mesir, Thailand, Syria, Saudi Arabia, Nepal, Libanon, Transyordania, Irak, Yaman, Pakistan, Cina, Filipina, Selandia Baru, Abessinia, dan Australia.

### **Membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia**

Setelah mengetahui Belanda mulai masuk ke wilayah Yogyakarta, para pemimpin Republik lalu mengadakan rapat di Istana dan sepakat untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera yang akan dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Mandat pembentukan pemerintahan darurat ditandatangani oleh Sukarno dan Hatta berisikan *“Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 19-12-1948, jam 6 pagi Belanda telah memulai serangannya atas ibukota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.”*

Mandat juga diberikan kepada Sudarsono, Palar, dan Maramis untuk mendirikan pemerintahan pengasingan di New Delhi, India. Surat mandate ditandatangani oleh Sukarno dan Agus Salim dengan isi *“Jika ikhtiar Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan pemerintahan darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada saudara-saudara dikuasakan untuk membentuk Exile Government Republic Indonesia di India. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Syafruddin di Sumatera. Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya.”*

Hal menarik yang kemudian sempat memicu perdebatan adalah kesaksian Syafruddin Prawiranegara yang menyatakan tidak pernah menerima mandat tersebut. Ide mendirikan pemerintahan darurat justru diambil atas inisiatif pribadi setelah didesak oleh pemimpin partai dan militer di Bukittinggi, Sumatera Barat. Pengakuan Syafruddin berbunyi *“Pada waktu itu saya belum tahu bahwa ada mandate dari Presiden untuk membentuk pemerintahan darurat. Tetapi semata-mata didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai pemimpin Muslim, tiga hari kemudian, pada waktu subuh tanggal 22 Desember 1948, setelah bermusyawarah dengan pemimpin-pemimpin sipil dan militer yang mendampingi saya, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk melanjutkan perjuangan.”*<sup>5</sup>

Susunan Pemerintahan Darurat terdiri dari Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua (Perdana Menteri), merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan, A.A. Maramis sebagai Menteri Luar Negeri, Teuku Mohammad Hasan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merangkap Menteri Dalam Negeri ad interim dan Menteri Agama ad interim, Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman, Sutan Rasyid sebagai Menteri Sosial dan Perburuhan, Pembangunan, Organisasi Pemuda dan Keamanan, Ir. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kesehatan ad interim, Ir. Inderacaya sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Kemakmuran ad interim.

Keberadaan PDRI tidak hanya sebatas pandangan untuk membuktikan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia masih ada, kenyataannya PDRI juga ikut bergerilya keluar

---

<sup>5</sup> Polemik yang memandang Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden yang sudah sepatutnya diakui secara formal oleh negara menjadi pembahasan yang perlu dikaji secara khusus, melibatkan berbagai perspektif baik dari sisi sejarah, politik, dan juga hukum.

masuk hutan, membawa radio untuk memantau keadaan dan menyuarakan keberadaan pemerintah dari daerah-daerah yang menjadi basis perjuangan PDRI.

### **Tentara Bergerilya dan Membentuk Pemerintahan Militer**

Dalam perspektif militer, menyerahnya para pemimpin Republik terhadap Belanda adalah hal yang tidak dapat dimengerti. Bagaimana mungkin disaat para tentara rela mengorbankan jiwa raga untuk Republik namun disisi lain para pemimpin sipil justru menyatakan menyerah. Perbedaan pandangan antara tentara Republik dan pemimpin sipil Republik membuat Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah kilat sebelum mengundurkan diri ke pedalaman dan melakukan perang gerilya untuk menghadapi Belanda. Perintah kilat Jenderal Sudirman berisikan: (1) Kita telah diserang; (2) Pada tanggal 19 Desember 1948, angkatan perang Belanda menyerang Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo; (3) Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata; (4) Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan tersebut.

Perintah kilat Jenderal Sudirman diterima oleh Kolonel A.H. Nasution (Wakil Panglima Tentara dan Teritorium Jawa Tengah) dan setelah tersiar berita penangkapan para pemimpin Republik, ia segera membentuk pemerintahan militer dan menyusun pertahanan rakyat semesta. Tanggal 22 Desember 1948 pemerintahan militer untuk Jawa diproklamkan. Kedudukan pemerintahan militer semakin kuat setelah pada awal Januari 1949 terbit surat pengesahan yang ditandatangani oleh T.B. Simatupang (Wakil Kepala Staff Angkatan Perang) dan Sukirman (Menteri Dalam Negeri) atas nama pemerintah.

### **Keteguhan Hamengkubuwono IX Buat Belanda Gagal Memerintah**

Ketika menduduki ibukota Yogyakarta, Belanda berusaha membujuk Sultan Hamengkubuwono IX untuk bekerja sama dengan iming-iming Sultan diberi jabatan wali negara wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur serta Madura dalam bentuk Negara Indonesia Serikat, dan selama itu pula Sultan selalu menolak tawaran tersebut.<sup>6</sup> Bahkan perundingan di Keraton antara Sultan dengan Jenderal Spoor selama 30 menit yang diadakan atas permohonan Kolonel van Langen pun tidak menemukan kesepakatan apapun. Sultan pernah mengejutkan pihak Belanda dengan mengucapkan “saya adalah Menteri Negara Republik Indonesia yang setia”, kalimat ini kemudian menyebar dikalangan rakyat dan gerilyawan yang dengan sikapnya Sultan mampu menunjukkan keteladanan untuk tetap memegang teguh komitmen untuk bangsa dan negara.

### **Belanda Mundur, Mandat Dikembalikan**

Resolusi PBB tanggal 28 Januari 1949 mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer, segera membebaskan para tahanan politik tanpa syarat, dan melanjutkan perundingan. Dalam keadaan terdesak, Belanda menyampaikan undangan kepada KTN dan Sukarno untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 12 Maret 1949 di Den Haag, Belanda. Namun sebelum itu disepakati untuk mengadakan pertemuan pendahuluan antara Belanda

---

<sup>6</sup> Strategi Belanda untuk mendekati Sultan menjadi jawaban mengapa Sultan tidak ikut diasingkan seperti halnya para pemimpin Republik lainnya.

dan Indonesia dibawah pengawasan KTN. Belanda diwakili oleh Van Royen dan Indonesia menunjuk Mr. Mohammad Roem sebagai wakilnya.<sup>7</sup> Mr. Roem dalam pertemuan tersebut turut mendorong pengembalian ibukota Yogyakarta yang diduduki Belanda, bahkan Sultan Hamengkubuwono IX pada 11 April 1949 sampai pergi ke Jakarta dan meyakinkan KTN bahwa apabila ibukota Yogyakarta dikembalikan dan tentara Belanda ditarik mundur, Sultan sanggup menjamin keamanan didaerah Republik. Selain itu Mr. Roem juga mengingatkan akan realisasi dari Resolusi PBB 28 Januari dan menyambut baik usulan Konferensi Meja Bundar.

Tanggal 24-30 Juni 1949 Belanda menarik mundur tentaranya dari ibukota Yogyakarta tanpa gangguan sedikitpun dari para penduduk maupun gerilyawan. Tanggal 4 Juli 1949 Mr. Leimena pergi ke Bukittinggi untuk menemui pemimpin PDRI, Syafruddin Prawiranegara membahas situasi terkini pasca penarikan mundur tentara Belanda<sup>8</sup>. Tanggal 6 Juli 1949 Sukarno-Hatta kembali ke ibukota Yogyakarta dan disambut dengan meriah oleh segenap masyarakat pendukung Republik. Tanggal 10 Juli 1949 Mr. Leimena kembali dari Bukittinggi bersama para pemimpin PDRI. Pada sidang kabinet pertama setelah ibukota kembali dan para pemimpin Republik dibebaskan, secara legowo dan patriot Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat sebagai pemimpin PDRI kepada Sukarno selaku Presiden Republik Indonesia Serikat.

Tanggal 3 Agustus 1949 Sukarno memberikan amanat gencatan senjata kepada para gerilyawan sekaligus memanggil Jenderal Sudirman agar segera kembali ke Yogyakarta. Dalam amanatnya Sukarno berkata *“Aku tahu, hai anak-anakku dari angkatan perang, engkau akan tunduk kepada perintahku ini. Korban-korbanmu telah banyak, dan aku, seluruh tanah air, berterima kasih atas korbanmu itu. Dengan persetujuan politik itu, berubahlah kewajibanmu dari mengadakan perang gerilya kepada menghentikan perang gerilya itu sambil ikut serta menjamin keamanan pada tempatmu masing-masing untuk keselamatan rakyat.”*

### **Hikmah Sejarah**

- Peristiwa yang buruk sekalipun seperti agresi militer II dan penangkapan Pemimpin Republik justru bisa menghadirkan momentum baru bagi pembentukan pemerintahan Republik yang baru lahir ketika itu
- Strategi perjuangan yang dirancang oleh para pemimpin Republik baik dari sisi militer maupun sipil menarik untuk dilihat dalam upaya mencapai tujuan yang sama demi kepentingan Republik serta didudukan secara proporsional berdasarkan konteks masa itu
- Sipil dan militer, keduanya memainkan peranan atas dasar inisiatif dan sudut pandang berdasarkan karakteristiknya masing-masing
- Pandangan melihat dukungan internasional sebagai bagian dari perjuangan adalah sebuah pemikiran metropolis yang dibangun oleh para pendiri bangsa dan

---

<sup>7</sup> Penunjukan Mr. Mohammad Roem oleh Sukarno sempat memicu kekecewaan Syafruddin Prawiranegara karena diputuskan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemimpin PDRI.

<sup>8</sup> Semula Hatta, Natsir, Ali Sastroamidjojo, Abdul Halim dan Nazir Datuk Pamontjak juga ingin berangkat dari pengasingan Muntok, Bangka ke Bukittinggi namun tidak berhasil.

penting untuk direfleksikan dimasa sekarang tentang bagaimana kita membina hubungan serta memainkan isu dalam ruang lingkup global

- Jika di Jawa identik dengan perjuangan gerilya oleh militer, jangan lupakan juga bahwa di Sumatera pada akhirnya sipil dan militer juga ikut berjuang secara gerilya melalui PDRI, sehingga posisi antara sipil dan militer tidak perlu dipertentangkan terlalu berlebihan
- Bagaimanapun hebatnya Sukarno dan Hatta, mereka tidak dapat sendirian untuk menjaga Republik ini, perlu ada pembagian peran dan dukungan dalam mengelola negara secara kolektif baik dari unsur kabinet, tentara maupun rakyat
- Keteguhan hati Sultan Hamengkubuwono IX untuk setia pada Republik menjadi teladan yang implikasinya dimasa sekarang Kesultanan Yogyakarta mendapatkan status daerah istimewa
- Sikap amanah dan legowo Syafruddin Prawiranegara yang tidak mabuk kekuasaan serta dengan sadar mengembalikan mandat yang diberikan kepada Sukarno
- Kepatuhan Jenderal Sudirman sebagai Prajurit terhadap pimpinannya ketika diminta kembali ke Yogyakarta dan menghentikan perang gerilya

## Referensi

Agung, Ide Anak Agung Gde. 1991. *Renville*. Jakarta: Sinar Harapan.

Hakiem, Lukman dan Mohammad Noer (Penyunting). 2011. *Mr. Sjafruddin Prawiranegara Pemimpin Bangsa dalam Pusaran Sejarah*. Jakarta: Harian Republika.

Kahin, George McTurnan. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.

Muljana, Slamet. 1986. *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan jilid 3*. Jakarta: Inti Idayu Press.

Ricklefs, M.C. 2010. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.